

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap entitas, termasuk pemerintahan daerah, wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang bisa memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan dalam instansi tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggung jawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetya, 2005).

Untuk itu pemerintah daerah harus mampu dan memiliki kemampuan menyajikan laporan keuangan. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik di pemerintahan terutama di pemerintahan daerah, dari pihak pemerintah serta *human* nya sendiri yang terlibat dalam instansi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dan sangat fatal andai salah satunya tidak berfungsi dengan baik. Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada public, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo,2009). Banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, bisa dari pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kompetensi sumber daya manusianya.

Penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kualitas suatu laporan keuangan daerah dengan banyaknya wilayah yang ada di Indonesia ini, selain dari pihak pemerintahannya sendiri dan juga satuan unit kerja dalam suatu entitas daerah haruslah juga yang memiliki peranan utama dalam menciptakan laporan keuangan daerah yang berkualitas, yang mana nantinya laporan keuangan tersebut di gunakan untuk mengambil keputusan. Pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah.

Dengan di buatnya peraturan oleh pemerintah pusat maka akan berpengaruh untuk hasil pelaporan keuangan pemerintah daerah baik itu berdampak baik atau buruk bagi pemerintahan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor lain lagi, seperti dapatkah peraturan tersebut terapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Banyak upaya serta faktor yang dapat mempengaruhi baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal yang dapat membuat kualitas laporan keuangan dalam kondisi baik atau kurang baik bahkan dapat dikatakan buruk, laporan keuangan pemerintah khususnya pemerintah daerah tersebut akan di audit dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang nantinya BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut, ada Lima opini yang dapat di berikan BPK yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*WTPPP/Modified Unqualified Opinion*) Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*).

Semakin baik hasil pemeriksaan dari BPK untuk suatu entitas pada pemerintahan daerah berbanding lurus dan sejalan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah tersebut. Akan sangat baik jika setiap tahunnya suatu daerah yang bersangkutan yang telah diperiksa oleh BPK dan mendapat opini WTP. Dan dapat dipertanyakan jika hasil pemeriksaan dari BPK atas laporan keuangan daerah suatu instansi pemerintahan daerah mendapat opini dari BPK selain dari WTP, seperti mendapat opini WDP, TMT bahkan TW hal tersebut dapat dipastikan ada sesuatu yang salah seperti, keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan, ada yang kurang atau tidak lengkapnya hasil laporan keuangan yang dibuat.

Untuk mendapatkan opini WTP dari BPK tidaklah mudah bagi satuan unit kerja pemerintah daerah, banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi salah satunya adalah laporan keuangan tersebut haruslah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kabupaten Kubu Raya mendapat opini dari BPK selama 7 tahun terakhir berturut-turut (Suratkalbar.com, 2021). Akan tetapi hal tersebut belum cukup untuk menilai apakah kualitas laporan

keuangan pada Kabupaten Kuburaya dianggap sangat baik karena banyak faktor lain yang mempengaruhi, tetapi dengan mendapat opini tersebut merupakan suatu prestasi karena masih banyaknya Kabupaten lain di Kalimantan Barat yang belum mampu mendapatkan opini WTP dari BPK, adapun yang mendapat opini WTP tidak sampai 7 tahun berturut-turut.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat pengaruh yang sangat besar untuk berbagai aspek dalam kehidupan pada era saat ini begitu juga pada hasil dari kualitas keuangan suatu pemerintahan daerah tentunya, pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam peraturan pemerintah No 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Di dalam nya menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Tetapi teknologi yang sudah sangat maju pada saat ini tidak akan berguna secara maksimal jika penggunaanya tidak mampu untuk mengoperasikannya secara maksimal, hal ini lah yang biasanya menjadi kendala dan bahkan masalah dalam suatu organisasi, karena dengan kurangnya kemampuan dan ketinggalan dalam perkembangan zaman membuat berbagai macam dampak dan akibat dalam berbagai aspek kehidupan, selain dari pengguna dari teknologi tersebut, alat sarana dan prasarana yang menunjang agar teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan kembali kepada tujuan dari diciptakannya teknologi dan informasi tersebut adalah agar dapat membantu serta mempermudah dari pekerjaan manusia itu sendiri.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat erat kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang baik dan berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang terdapat pada standar akuntansi yang berlaku, oleh sebab itu SAP berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD). SAP yang ditetapkan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK no. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat, maka sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Pemandagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu pada pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas laporan keuangan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam berbagai aspek dan bidang pekerjaan yang ada, khususnya yang ada di Indonesia ini, manusia sangatlah penting karena yang mengelola dan yang menjalankan suatu organisasi adalah manusia, suatu instansi hanyalah wadah dan merupakan benda mati tanpa adanya manusia didalam yang mengelola dan menjalankan suatu instansi tersebut.

Dengan demikian manusialah sebagai penggerak dalam menjalankan dari setiap bagian yang terkecil hingga yang terbesar dalam sebuah instansi pemerintahan daerah, lalu manusia yang bagaimana yang dapat mengelola serta menyusun laporan keuangan yang baik dan benar hingga bisa nantinya menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia ini. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang

berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Karsana & Suaryana (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI Pada Kualitas. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa hasil penelitian Kasana & Suaryana (2017) berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan topik serupa, hanya saja membedekan dengan sebelumnya adalah waktu dan tempat penelitiannya. Oleh sebab itu peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut: **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh antara pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Mengetahui pengaruh antara penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga diharapkan bisa sebagai masukan dan tambahan pengetahuan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini maka penulis mengharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah sebagai koreksi dan evaluasi dimasa lalu serta menjadi masukan dan pertimbangan untuk kedepannya terkait pentingnya Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.